FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Freddy S. Kawatu, Lenny L. Evinita, Syunia R. Ramenusa
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
email: ramenusa362@gmail.com

Abstrak: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau keududkan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mengapa target pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 22 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak mencapai target. Jenis penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penyebab PBB tidak terealisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan karena keonomi wajib pajak, terdapat kesulitan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan pendataan kembali wajib pajak yang telah meninggal agar jelas siapa yang akan melunasi PBB,selanjutnya BPKPD diharapkan berupaya mengoptimalkan realisasi PBB melalui sosialisasi pembayaran PBB, penetapan PBB lebih cepat, perbaikan data wajib pajak dan melakukan pendataan kembali wajib pajak yang telah meninggal agar SPPT tersampaikan.
Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Abstract: *Land and Building Tax (PBB) is a tax levied on land buildings because of profits and/or better socio-economic position for people or entities who have rights over them or obtain benefits from them. The aim of this research is to find out the realization and target of land building (PBB) and to find out the land building tax (PBB) target in 22 sub-districts in Sangihe Islands Regency did not reach the target. This type of research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this research show that the cause of PBB not being realized according to the target set it due to the economy of taxpayer, lack of taxpayer data collection for taxpayers who have died so that it is clear who will pay off PBB next. The Regional Financial and Revenue Management Agency is expected to make efforts to optimize the realization of PBB through socializing PBB payment, determining PBB more quickly, improving taxpayer so that SPPT is submitted.*
Keywords:*(Land and Building (PBB)).*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan nasional tentunya memerlukan dana. Dana yang diperluhkan untuk membiayai pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan (Joalgabsa et al., 2021). Pajak memiliki sumber utama yang tetap terhadap penerimaan negara yang sangat penting dalam melaksanakan atau meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat ditetapkan) dengan tidak medapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Fikri, 2024). Pajak daerah adlah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang berwenang pemungutannya adalah pada pemerintah daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan disuatu daerah (Jannah et al., 2016).

Pajak daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

(BPJT), Pajak reklame, Pajak Air dan Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang diambil pemerintah, tapi hasilnya diperoleh untuk kesejahteraan rakyat, sebab itu sebagian hasil pajak tersebut harus diserahkan ke pemerintah daerah (Langi et al., 2021).

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat beberapa jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Kepualauan Sangihe memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Dimana pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pembangunan sarana umum dan pembangunan fasilitas umum infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sehubungan dalam menjalankan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Kepualauan Sangihe pada 22 kelurahan yang ada di Sangihe sebagaimana masih terlihat masalah-masalah yang ada didalamnya biasanya dari ekonomi wajib pajak, surat penyampaian pajak terutang (SPPT) dan wajib pajak tidak taat. Maka penulis merumuskan masalah yaitu Berapa realisasi dan target Pajak Bumi dan Bangunan disetiap kelurahan yang ada diKabupaten Kepualaun Sangihe tahun 2022-2023 dan Mengapa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan disetaip kelurahan yang ada diKabupaten Kepualauan Sangihe belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022-2023.

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui berapa realisasi dan target pajak bumi dan bangunan disetaip kelurahan yang ada diKabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2022-2023 dan Mengapa realisasi pajak bumi dan bangunan disetiap kelurahan diKabupaten Kepualauan Sangihe pada tahun 2022-2023 belum bisa mencapai target. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis yang dapat menambah informasi atau pengetahuan tentang kontribusi pajak bumi dan bangunan diKabupaten Kepualaun Sangihe dan manfaat praktis yaitu bagi pemerintah diharapkan digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi, bagi penulis agar dapat menerapkan teori yang telah dipelajari, bagi pembaca agar dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan pajak bumi dan bangunan khususnya diKabupaten Kepulauan Sangihe. Berikut target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 22 Kelurahan diKabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2022:

Kelurahan Lesa target Rp.10.580.843 dan realisasi Rp.10.580.843 mencapai 100%, kelurahan Enempahembang target Rp.4.484.156 dan realisasi Rp.3.601.674 mencapai 80,32%, kelurahan Batulewe target Rp.10.155.191 dan realisasi Rp.7.253.896 mencapai 71,43%, kelurahan Tapuang target Rp.63.297.752 dan realisasi Rp.49.744.095 mencapai 78,59%, kelurahan Tona I target Rp. 55.658.538 dan realisasi Rp.51.269.954 mencapai 92,12%, kelurahan Tona II target Rp.38.326.177 dan realisasi Rp.38.326.177 mencapai 100%, kelurahan Tidore target Rp.37.807.350 dan realisasi Rp.37.088.850 mencapai 98,10%, kelurahan Dumuhung target Rp.39.711.041 dan realisasi Rp.35.223.386 mencapai 88,70%, kelurahan Soataloara I target Rp.52.764.431 dan realisasi Rp.46.924.341 mencapai 88,93%, kelurahan Soataloara II target Rp.44.367.933 dan realisasi Rp.42.917.976 mencapai 96,73%, kelurahan Sawang Bendar target Rp.145.536.831 dan realisasi Rp.121.871.741 mencapai 83,74%, kelurahan Apengsembeka target Rp.34.802.347 dan realisasi Rp.31.202.808 mencapai 89,66%, kelurahan Bungalawang target Rp.31.153.009 dan realisasi Rp.21.331.715 mencapai 68,47%, kelurahan Santiago target Rp.67.005.551 dan realisasi Rp.48.610.874 mencapai 72,55%, kelurahan Manente target Rp.41.237.490 dan realisasi Rp.26.585.301 mencapai 64,47%, kelurahan Mahena target Rp.15.051.986 dan realisasi Rp.15.051.986 mencapai 100%, kelurahan Pananekeng target Rp.14.646.931 dan realisasi Rp.11.393.490 mencapai 78,77%, kelurahan Angges target Rp.12.594.495 dan realisasi Rp.11.393.490 mencapai 95,21%, kelurahan Kolongan Mitung target Rp.16.324.848 dan realisasi Rp.16.324.848 mencapai 100%, kelurahan Kolongan Beha target Rp.8.202.734 dan realisasi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Rp.8.202.734 mencapai 100%, kelurahan Kolongan Beha Baru target Rp.9.658.456 dan realisasi Rp.9.658.456 mencapai 100% dan kelurahan Kolongan Akembawi target Rp.12.169.868 dan realisasi Rp.12.169.868 mencapai 100%. Sedangkan data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 22 Kelurahan diKabupaten Kepualauan Sangihe tahun 2023 sebagai berikut:

Kelurahan Lesa target Rp.10.580.843 dan realisasi Rp.10.580.843 mencapai 100%, kelurahan Enempahembang target Rp.4.462.006 dan realisasi Rp.4.462.006 mencapai 100%. kelurahan Batulewehe target Rp.10.064.495 dan realisasi Rp.7.524.222 mencapai 74,76%, kelurahan Tapuang target Rp.62.445.545 dan realisasi Rp.57.495.620 mencapai 92,07%, kelurahan Tona I target Rp.56.270.614 dan realisasi Rp.49.681.973 mencapai 88,29%, kelurahan Tona II target Rp.38.393.200 dan realisasi Rp.38.393.200 mencapai 100%, kelurahan Tidore target Rp.37.461.114 dan realisasi Rp.35.439.910 mencapai 95,75%, kelurahan Dumuhung Rp.39.795.314 dan realisasi Rp.32.439.910 mencapai 81,52%, kelurahan Soataloara I target Rp.52.296.510 dan realisasi Rp.38.002.647 mencapai 71,72%, kelurahan Soataloara II target Rp.45.343.194 dan realisasi Rp.44.115.893 mencapai 97,29%, kelurahan Sawang Bendar target Rp.145.979.784 dan realisasi Rp.132.811.763 mencapai 89,75%, kelurahan Apengsembeka target Rp.34.756.278 dan realisasi Rp.32.892.474 mencapai 94,64%, kelurahan Bungalawang target Rp.31.507.086 dan realisasi Rp.12.306.438 mencapai 39,06%, kelurahan Santiago target Rp.72.296.510 dan realisasi Rp.47.395.893 mencapai 65,56%, kelurahan Manente target Rp.42.463.240 dan realisasi Rp.25.397.370 mencapai 59,81%, kelurahan Mahena target Rp.15.214.303 dan realisasi Rp.12.102.081 mencapai 79,54%, kelurahan Pananekeng target Rp.14.344.004 dan realisasi Rp.12.052.353 mencapai 84,02%, kelurahan Angges target Rp.12.626.425 dan realisasi Rp.12.023.311 mencapai 95,22%, kelurahan Kolongan Mitung target Rp.16.114.192 dan realisasi Rp.16.114.192 mencapai 100%, kelurahan Kolongan Beha target Rp.8.137.344 dan realisasi Rp.6.647.160 mencapai 81,69%, kelurahan Kolongan Beha Baru target Rp.9.884.880 dan realisasi Rp.9.884.880 mencapai 100%, dan kelurahan Kolongan Akembawi target Rp.11.430.528 dan realisasi Rp.11.430.528 mencapai 100%.

Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan yan ada pada 22 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi fokus dalam penelitian ini dan penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi memiliki definisi sebagai suatu teknik atau perangkat sistem dalam mengukur dan mengelolah aktivitas transaksi keuangan perusahaan yang mampu menghasilkan informasi dari kegiatan dimana informasi tersebut membantu berbagai pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan (Novita, 2020). Akuntansi adalah keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu Lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya didalam suatu laporan keuangan.

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, 2019).

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Pajak juga merupakan kewajiban memberikan sebagian dari pendapatan untuk kas negara yangbisa dpaksakan, namun tidak mendapat kontraprestasi dari negara secara langsung (Badar & Kantohe, 2022).

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah analisis yang terlihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen-elemen itu sendiri. Dalam hal ini, analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang/badan pribadi kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kurang konsisten karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diduga hal ini disebabkan karena minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tingkat penghasilan wajib pajak tidak mencukupi atau tidak tetap. Serta pelayanan perpajakan kurang memuaskan yang diberikan oleh aparatur pajak, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang tatacara perpajakan sehingga minimnya pengetahuan yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran (Kolong et al., 2022). Dasar hukum atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tanggal 15 September 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor perdesaan dan perkotaan. Maka dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2014 (DPR RI, 1994).

Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan pajak dengan kata lain NJOP dijadikan dasar untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga besar kecilnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat mempengaruhi penerimaan pajak bagi negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (Lahan et al., 2020).Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besar Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri keuangan kecuali untuk daerah tertentu setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan daerahnya. Setiap daerah memiliki NJOP yang berbeda-beda diakrenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maksud dari penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penulis mendeskripsikan peristiwa atau kejadian dalam penelitian dengan pendekatan kata-kata atau kalimat dan lebih menekankan kepada makna, penalaran, definisi, dan situasi tertentu (dalam konteks kejadian tersebut). Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dan dibuat laporan penelitian.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Sumber data diperoleh dari data sekunder dan primer. Informan yaitu 2 orang pegawai BPKPD,Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Humberman (Prof. Dr Sugiyono, 2017), membagi analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan uji keabsahan data yaitu uji credibility, uji dependability dan uji konfirmability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang tercapai mencapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektif, maka kemampuan daerah pun semakin baik demikian juga sebaliknya. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci mengaktegorikan efektivitas pajak daerah kedalam lima tingkat efektivitas seperti pada tabel berikut:

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
≤60%	Tidak efektif

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Efektivitas menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target maka dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengukur tingkat efektivitas target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ PBB} \text{ X } 100\%$$

Dibawah ini merupakan perhitungan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 8 Keluarahan di Kecamatan Tahuna Timur tahun 2022:

Efektivitas PBB Kel. Lesa (2022) $= \frac{10.580.843}{10.580.843}$ x100%
= 100%

Efektivitas PBB Kel. Enempahembang (2022) $= \frac{3.601.674}{4.484.156}$ x100%
= 80,32%

Efektivitas PBB Kel. Batulewehe (2022) $= \frac{7.253.896}{10.155.191}$ x100%
= 71,43%

Efektivitas PBB Kel. Tapuang (2022) $= \frac{49.744.095}{63.297.752}$ x100%
= 78,59%

Efektivitas PBB Kel. Tona I (2022) $= \frac{51.269.954}{55.658.538}$ x100%
= 92,12%

Efektivitas PBB Kel. Tona II (2022) $= \frac{38.326.177}{38.326.177}$ x100%
= 100%

Efektivitas PBB Kel. Tidore (2022) $= \frac{37.088.850}{37.807.350}$ x100%

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

= 98,10%

Efektivitas PBB Kel. Dumuhung (2022) $= \frac{35.223.386}{39.711.041}$ x100%

= 88,70%

Dibawah ini merupakan perhitungan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 8 kelurahan di Kecamatan Tahuna Timur 2022:

NAMA KELURAHAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Lesa	10.580.843	10.580.843	100
Enempahembang	4.484.156.	3.601.674	80,32
Batulewehe	10.155.191	7.253.896	71,43
Tapuang	63.297.752	49.744.095	78,59
Tona I	55.658.538	51.269.954	92,12
Tona II	38.326.177	38.326.177	100
Tidore	37.807.350	37.088.850	98,10
Dumuhung	39.711.041	35.223.386	88,70
Jumlah	**260.021.048**	**233.088.875**	**89,64**

Dibawah ini merupakan perhitungan target dan realisasi PBB 8 Kelurahan diKecamatan Tahuna Timur Tahun 2023:

Efektivitas PBB Kel. Lesa (2023) $= \frac{10.580.843}{10.580.843}$ x100%

=100%

Efektivitas PBB Kel.Enempahembang (2023) $= \frac{4.462.006}{4.462.006}$ = x100%

= 100%

Efektivitas PBB Kel. Batulewehe (2023) $= \frac{7.524.222}{10.064.495}$ x100%

= 74,76%

Efektivitas PBB Kel. Tapuang (2023) $= \frac{57.495.620}{62.445.545}$ x100%

= 92,07%

Efektivitas PBB Kel. Tona I (2023) $= \frac{49.681.973}{56.270.614}$ x100%

= 88,29%

Efektivitas PBB Kel. Tona II (2023) $= \frac{38.393.200}{38.393.200}$ x100%

= 100%

Efektivitas PBB Kel. Tidore (2023) $= \frac{35.868.099}{37.461.114}$ x100%

= 95,75%

Efektivitas PBB Kel. Dumuhung (2023) $= \frac{32.439.910}{39.795.314}$ x100%

= 81,52%

Berikut ini tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Tahuna Timur tahun 2023:

NAMA KELURAHAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Lesa	10.580.843	10.580.843	100
Enempahembang	4.462.006	4.462.006	100
Batulewehe	10.064.495	7.524.222	74,76
Tapuang	62.445.545	57.495.620	92,07
Tona I	56.270.614	49.681.973	88,29
Tona II	38.393.200	38.393.200	100
Tidore	37.461.114	35.868.099	95,75

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Dumuhung	39.795.314	32.439.910	81,52
Jumlah	**259.473.131**	**236.445.873**	**91,13**

Dibawah ini merupakan perhitungan target dan realisasi PBB 8 Kelurahan diKecamatan Tahuna 2022:

Efektivitas PBB Kel. Soataloara I (2022) $= \frac{46.924.341}{52.764.431}$ x100%
= 88,93%

Efektivitas PBB Kel. Soataloara II (2022) $= \frac{42.917.976}{44.367.933}$ x100%
= 96,73%

Efektivitas PBB Kel. Sawang Bendar (2022) $= \frac{121.871.741}{145.536.831}$ x100%
= 83,74%

Efektivitas PBB Kel. Apengsembeka (2022) $= \frac{31.202.808}{34.802.347}$ x100%
= 89,66%

Efektivitas PBB Kel. Bungalawang (2022) $= \frac{21.331.715}{31.153.009}$ x100%
= 68,47%

Efektivitas PBB Kel. Santiago (2022) $= \frac{48.610.874}{67.005.551}$ x100%
= 72,55%

Efektivitas PBB Kel. Manente (2022) $= \frac{26.585.301}{41.237.490}$ x100%
= 64,47%

Efektivitas PBB Kel. Mahena (2022) $= \frac{15.051.986}{15.051.986}$ x100%
= 100%

Berikut ini tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Tahuna tahun 2022:

NAMA KELURAHAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Soataloara I	52.764.431	46.924.341	88,93
Soataloara II	44.367.933	42.917.976	96,73
Sawang Bendar	145.536.831	121.871.741	83,74
Apengsembeka	34.802.347	31.202.808	89,66
Bungalawang	31.153.009	21.331.715	68,47
Santiago	67.005.551	48.610.874	72,55
Manente	41.237.490	26.585.301	64,47
Mahena	15.051.986	15.051.986	100
Jumlah	**431.919.578**	**354.496.742**	**82,07**

Dibawah ini merupakan perhitungan target dan realisasi PBB 8 Kelurahan diKecamatan Tahuna Tahun 2023:

Efektivitas PBB Kel. Soataloaran II (2023) $= \frac{38.002.647}{52.989.250}$ x100%
= 71,72%

Efektivitas PBB Kel. Soataloara I (2023) $= \frac{44.115.674}{45.343.194}$ x100%
= 97,29%

Efektivitas PBB Kel. Sawang Bendar (2023) $= \frac{132.811.763}{147.979.784}$ x100%
= 89,75%

Efektivitas PBB Kel. Apengsembeka (2023) $= \frac{32.892.474}{34.756.278}$ x100%
= 94,64%

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Efektivtas PBB Kel. Bungalawang (2023) $= \frac{12.306.438}{31.507.086}$ x100%
= 39,06%

Efektivitas PBB Kel. Santiago (2023) $= \frac{47.395.893}{72.296.510}$ x100%
= 65,56%

Efektivitas PBB Kel. Manente (2023) $= \frac{25.397.370}{42.463.240}$ x100%
= 59,81%

Efektivitas PBB Kel. Mahena (2023) $= \frac{12.102.081}{15.214.303}$ x100%
= 79,54%

Berikut ini tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Tahuna tahun 2023:

NAMA KELURAHAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Soataloara I	52.989.250	38.002.647	71,72
Soataloara II	45.343.194	44.115.893	97,29
Sawang Bendar	147.979.784	132.811.763	89,75
Apengsembeka	34.756.278	32.892.474	94,64
Bungalawang	31.507.086	12.306.438	39,06
Santiago	72.296.510	47.395.893	65,56
Manente	42.463.240	25.397.370	59,81
Mahena	15.214.303	12.102.081	79,54
Jumlah	**442.549.645**	**345.024.559**	**77,96**

Dibawah ini merupakan perhitungan target dan realisasi PBB 6 Kelurahan diKecamatan Tahuna Barat Tahun 2022:

Efektivitas PBB Kel. Pananekeng (2022) $= \frac{11.393.490}{14.464.931}$ x100%
= 78,77 %

Efektivitas PBB Kel. Angges (2022) $= \frac{11.991.381}{12.594.495}$ x100%
= 95,21%

Efektivitas PBB Kel. Kolongan Mitung (2022) $= \frac{16.324.848}{16.324.848}$ x100%
= 100%

Efwktivitas PBB Kel. Kolongan Beha (2022)$= \frac{8.202.734}{8.202.734}$ x100%
= 100%

Efektivitas PBB Kel. Kolongan Beha Baru (2022) $= \frac{9.658.456}{9.658.456}$ x100%
= 100%

Efektivitas PBB Kel. Kolongan Akembawi (2022) $= \frac{12.169.868}{12.169.868}$ x100%
= 100%

Berikut ini tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Tahuna Barat tahun 2022:

NAMA KELURAHAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pananekeng	14.464.931	11.393.490	78,77
Angges	12.594.495	11.991.381	95,21
Kolongan Mitung	16.324.848	16.324.848	100
Kolongan Beha	8.202.734	8.202.734	100
Kolongan Beha Baru	9.658.456	9.658.456	100

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Kolongan Akembawi	12.169.868	12.169.868	100
Jumlah	**73.415.332**	**69.740.777**	**94,99**

Dibawah ini merupakan perhitungan target dan realisasi PBB 6 Kelurahan diKecamatan Tahuna Barat Tahun 2023:

Efektivitas PBB Kel. Pananekeng (2023) $= \frac{12.052.353}{14.344.004}$ x100%
= 84.02%

Efektivitas PBB Kel. Angges (2023) $= \frac{12.052.353}{12.626.425}$ x100%
= 95,22%

Efektivitas PBB Kel. Kolongan Mitung (2023) $= \frac{16.114.192}{16.114.192}$ x100%
= 100%

Efektivitas PBB Kel. Kolongan Beha (2023) $= \frac{6.647.160}{8.137.344}$ x100%
= 81.69%

Efektivitas PBB Kel. Kolongan Beha Baru (2023) $= \frac{9.884.880}{9.884.880}$ x100%
= 100%

Efektivitas PBB Kel. Kolongan Akembawi (2023) $= \frac{11.430.528}{11.430.528}$ x100%
= 100%

Berikut ini tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Tahuna Barat tahun 2023:

NAMA KELURAHAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pananekeng	14.344.004	12.052.353	84,02
Angges	12.626.425	12.023.311	95.,22
Kolongan Mitung	16.114.192	16.114.192	100
Kolongan Beha	8.137.344	6.647.160	81,69
Kolongan Beha Baru	9.884.880	9.884.880	100
Kolongan Akembawi	11.430.528	11.430.528	100
Jumlah	**72.537.373**	**68.152.528**	**93,95**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran penting dalam pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabuapten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022. Ada 22 Kelurahan yang ada di 3 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami target dan realisasi yang naik turun. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diKelurahan Lesa target dan realisasi Rp.10.580.843, Tona I target dan realisasi Rp. 38.326.177, Kelurahan Mahena target dan realisasi Rp.15.051.986, Kelurahan Kolongan Mitung target dan realisais Rp.16.324.848, Kelurahan Kolongan Beha target dan realisasi Rp.8.202.734, Kelurahan Beha Baru target dan realisasi Rp.9.658.456, dan Kelurahan Kolongan Akembawi target dan realisasi Rp. 12.169.868, 7 kelurahan ini sudah mencapai 100% target dan realisasi pada tahun 2022. Sedangkan ada beberapa kelurahan yang belum bisa mencapai target dan realisasi pada tahun 2022 yaitu Kelurahan Batulewehe hanya mencapai realisasi Rp.7.253.896 dari target Rp.10.155.191 atau 71,43%, Kelurahan Tapuang hanya mencapai realisasi Rp.49.744.095 dari target Rp.63.297.752 atau 78,59%, Kelurahan Manente hanya mencapai realisasi Rp.26.585.301 dari target Rp.41.237.490 atau hanya 64,47%, Kelurahan Bungalawang hanya mencapai realisasi Rp.21.331.715 dari target Rp.31.153.009 atau hanya 68,47% dan Kelurahan Pananekeng hanya mencapai realisasi Rp.11.393.490 dari target Rp.14.464.931 atau hanya 78,77%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 ada beberapa Kelurahan yang bisa mencapai target dan ada juga beberapa Kelurahan belum bisa mencapai target. Kelurahan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
JEKMA JURNAL EKONOMI, KEPENDIDIKAN, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI
ISSN 3025-2105

Lesa target dan realisasi Rp.10.580.843, Kelurahan Enempahembang target dan realisasi Rp.4.462.006, Kelurahan Tona II target dan realisasi Rp.38.393.200, Kelurahan Kolongan Mitung target dan realisasi Rp.16.114.192, Kelurahan Kolongan Beha Baru target dan realisasi Rp.9.884.880 dan Kelurahan Kolongan Akembawi target dan realiasasi Rp.11.430.528, 6 kelurahan ini pada tahun 2023 telah mencapai target dan realisasi 100%. Sedangkan ada beberapa keluarah yang belum mencapai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 yaitu Kelurahan Batulewehe hanya mencapai realisasi Rp.7.524.222 dari target Rp.10.064.495 atau hanya 74,76%, Kelurahan Bungalawang hanya mencapai realisasi Rp.12.306.438 dari target Rp.31.507.086 atau hanya 39,06%, Kelurahan Manente hanya mencapai Rp.25.397.370 dari target Rp.42.463.240 atau hanya 59,81% dan Keluarahan Santiago hanya mencapai realisasi Rp.47.395.893 dari target Rp.72.296.510 atau hanya 65,56%.

Berdasarkan survei dilapangan yang dilakukan peneliti, dimana pihak apparat pemungut pajak kesulitan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akibat kesalahan data wajib pajak mengalami kekeliruan baik itu nama, ataupun alamat objek pajak, ekonomi wajib pajak yang tidak semua wajib pajak memiliki pekerjaan tetap, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, kurangnya sosialisasi dari apparat pemungutan pajak tentang penting membayar pajak dan tidak adanya pendataan kembali wajib pajak yang sudah meninggal sehingga kurang jelas siapa yang akan meneruskan membayar pajak. Upaya agar masalah ini tidak terjadi yaitu dengan adanya perbaikan data dari wajib pajak yang sudah meninggal agar jelas siapa yang melanjutkan membayar pajak, melakukan sosialisasi tentang pajak kepada wajib pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakuka Gregoria W. Mugawe (2023), yang menjelaskan penyebab tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan upaya yang dilakukan agar Pajak Bumi dan Bangunan biasa tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di 22 Kelurahan ini mengalami fluktuasi dan realisasi tidak mecapai target seperti beberapa Kelurahan pada tahun 2022 dan Tahun 2023, Kelurahan Batulewehe 71,43%, Kelurahan Bungalawang 68,66%, dan Kelurahan Pananekeng 78,77%. Tahun 2023 ada beberapa kelurahan yang presentasenya rendah yaitu Kelurahan Batulewehe 74,76%, Kelurahan Bungalawang 39,06% dan Kelurahan Manente 59,81%. Adapun beberapa kelurahan yang bisa mencapai target tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu Kelurahan Lesa, Kelurahan Tona II, Kelurahan Enempahembang, Kelurahan Mahena, Kelurahan Kolongan Mitung, Kelurahan Kolongan Beha Baru, Kelurahan Beha dan Kelurahan Kolongan Akembawi yang mencapai 100%. 2. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 22 Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu: Ekonomi wajib pajak, Kurangnnya sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penyampaian SPPT yang terlambat dan Pendataan kembali wajib pajak yang sudah meninggal,sehingga jelas siapa yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saran peneliti yaitu Pemerintah daerah dalam hal ini yang bertugas pada bagian Pendapatan Daerah khususnya pada bagian Pengelolaan Pajak Daerah lebih rajin lagi melaksanakan sosialisasikepada wajib pajak, petugas pajak juga harus lebih teliti dan giat lagi dalam memberikan Surat Pemeberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak, agar wajib pajak mengetahui kapan harus membayar pajak dan bisa membayar pajak tepat waktu, sehingga tidak ada lagi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yan terutang dan dapat mempengaruhi Pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *3*(2), 334–343. https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677

DPR RI. (1994). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*.

Fikri, A. (2024). *Definisi Pajak Menurut Prof Dr Rochmat Soemitro*. RedaSamudera.Id.

Jannah, H. E. L. E. N., Suyadi, I., & Utami, H. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*|, *10*(1), 1–8.

Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). *Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Membayar Pajak (Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa)*. *2*(3), 377–387.

Kolong, R., Kewo, C., & Suot, H. L. (2022). Analisis Faktor-Faktor Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, *3*(2), 206–215.

Lahan, P. L., Bangunan, L., Tata, D. A. N., Kabupaten, D. I., Tahun, M., Mampow, G. L., Manengkey, J. J., & Marunduh, A. (2020). *Pengaruh luas lahan, luas bangunan dan tata letak tanah terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten minahasa tahun 2015-2017*. *1*(2), 13–18.

Langi, V., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *1*(3), 29–34. https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.663

Novita, D. (2020). Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan pada Toko Aliang. *Journal Universitas Internasional Batam*, *1*(2016), 5–12.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, A. (2019). *Perpajkaan Edisi 2019* (Andi (ed.); 2019th ed.). Andi Publisher.

Prof. Dr Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis* (M. S. Sofia Yustiani Suryandari, SE (ed.); 3rd ed.). Alfabeta, CV.